



STRATEGI KABINET UNTUK PENYEHATAN DAYA-BELI

**Makalah ke 6 , Serial Program
Kabinet; Dr Jan Hoesada,
KSAP.**

PENDAHULUAN

Manajemen dayabeli sebuah bangsa amat unik dan rumit, di pengaruhi berbagai jenis variabel peubah. Makalah amat sederhana, hadirin sidang pembaca di mohon mencari sumber-sumber lain sebagai perluasan wawasan pandang.

Artikel , 2025, berjudul *Jadikan 2025 Kebangkitan Daya Beli*, sumber Media Indonesia , antara lain mengungkapkan bahwa banyak orang yang memasuki 2025 dengan waspada. Sikap seperti itu wajar karena ketidakpastian masih ditemukan di mana-mana. Sikap waspada bukan berarti kehilangan optimisme. Saban tahun baru, optimisme selalu diapungkan. Namun, kali ini optimisme diikuti dengan banyak catatan. Di Tanah Air, salah satu yang paling dikhawatirkan oleh publik ialah masih melemahnya daya beli. Ibarat penyakit, melemahnya daya beli bisa menjadi kian berbahaya dan menggerogoti daya tahan tubuh dari waktu ke waktu. Karena itu, obat yang diberikan tidak cukup sekadar mengurangi rasa nyeri. Obat yang dibutuhkan ialah penghilang penyakit secara permanen. Hingga kini, penyakit itu masih bersarang, bahkan menggerogoti otot-otot ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi konsumsi rumah tangga yang tertahan sepanjang 2024 akibat kemampuan belanja masyarakat yang rendah.

Pada triwulan I 2024, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,91%, naik dari 4,47% pada triwulan IV 2023. Namun, mulai triwulan II dan berlanjut hingga triwulan III 2024, konsumsi rumah tangga tak banyak perubahan, masing-masing 4,93% dan 4,91%.

Bahkan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2024 yang 4,91% itu turun jika dibandingkan dengan kuartal III 2023 yang masih bisa tumbuh 5,06%. Karena itu, jika tren penurunan tersebut terus terjadi, nasib pertumbuhan ekonomi kita bakal makin mendapatkan tantangan besar, disebabkan konsumsi rumah tangga merupakan penyangga utama pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Lebih dari 50% kontributor pertumbuhan ekonomi kita ialah sektor konsumsi rumah tangga.

Sulit dibayangkan bagaimana nasib ekonomi Tanah Air jika sektor konsumsi rumah tangga terus terpukul disebabkan pelemahan daya beli yang terus-menerus. Rumitnya lagi, pemukul

daya beli di Tanah Air bukan semata banyaknya harga barang yang naik pada tahun lalu.

Saat harga-harga sudah mulai turun pun, daya beli belum kunjung naik. Bertambahnya angka pengangguran dan pendapatan masyarakat yang rata-rata hanya naik 1,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga membuat pertumbuhan konsumsi tertahan.

Menurunnya konsumsi paling banyak terjadi di kelompok kelas pekerja atau kelompok masyarakat yang dikategorikan BPS berada di kelas menengah, ialah kelompok yang berpenghasilan Rp4 juta-Rp5 juta per bulan.

Bukan cuma karena jumlah kelas pekerja yang juga turun akibat gelombang PHK terjadi sepanjang tahun, masyarakat yang masih bekerja pun mulai tergilas oleh fenomena 'makan tabungan' alias mantab. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), fenomena mantab itu dapat dilihat dari saldo rata-rata kelompok rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta pada Juni 2024 yang mencapai Rp1,5 juta. Angka itu anjlok jika dibandingkan dengan kondisi 2019 yang jumlahnya masih sebesar Rp3 juta.

Dari situ dapat dilihat bahwa kelompok kelas menengah yang menjadi motor penggerak utama konsumsi kini lebih cenderung berhati-hati dalam pengeluaran. Jika kelas pekerja mulai mengerem belanja, laju roda pertumbuhan ekonomi dipastikan akan melambat.

Situasi itu kian diperparah oleh susutnya jumlah kelas menengah. Kembali merujuk pada data BPS, banyak kelas pekerja yang kini sudah turun kelas. Dari 57,33 juta orang yang masuk kelas menengah pada 2019, kini jumlahnya tinggal 47,85 juta orang atau hampir 10 juta orang turun kelas dalam lima tahun terakhir. Jika dibuat rata-rata, 2 juta orang tiap tahun turun kelas. Penurunan itu tentu berdampak pada pengurangan kontribusi kelas menengah terhadap konsumsi domestik. Pangsa konsumsi mereka turun dari 45,6% pada 2018 menjadi hanya 40,3% pada 2023.

Persoalan daya beli masyarakat memang bukan masalah sepele bagi pemerintah. Apalagi ekonomi masih belum sepenuhnya pulih setelah sempat tertekan teramat dalam sepanjang 2020-2022 akibat pandemi covid-19.

Karena itu, pemerintah dituntut berpikir *out of the box* untuk mencari jalan keluar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mencari jalan kreatif dalam mengerek daya beli masyarakat, termasuk dengan memberikan insentif pajak, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan mendorong pertumbuhan pendapatan riil.

Tidak kalah penting, gerakkan kembali industri yang kini tengah tertatih-tatih menuju jurang deindustrialisasi. Itu disebabkan dari industrilah lapangan kerja formal terserap. Bila semua orang bekerja, daya beli akan menggeliat lagi.

Mumpung trompet Tahun Baru masih basah karena baru saja ditiup, ada baiknya pemerintah menjadikan 2025 sebagai tahun kebangkitan daya beli masyarakat. Jangan sampai lupa, salah satu esensi pembentukan negara ini ialah memajukan kesejahteraan umum, bukan membuatnya mundur.

Sumber Suara Kalbar mengungkapkan bahwa deflasi tahunan Indonesia pada tahun 2025 yang sebesar 0,09% **dianggap semu** karena tidak mencerminkan daya beli masyarakat. Deflasi tahunan ini terjadi setelah 25 tahun lamanya, yaitu sejak Maret 2000.

Deflasi tahunan ini disebabkan oleh diskon tarif listrik, beras, tomat, dan cabai merah. Deflasi tahunan ini terjadi karena adanya penurunan indeks kelompok pengeluaran, seperti perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Deflasi tahunan ini terjadi karena harga barang dan jasa sedang tren naik, sehingga daya beli masyarakat menurun. Deflasi tahunan ini terjadi karena suku bunga BI (Bank Indonesia) bertahan tinggi, sehingga UMKM tidak mampu membayar bunga kredit.

Komoditas yang berkontribusi deflasi

- Beras
- Tomat
- Cabai merah
- Daging ayam ras
- Daun bawang
- Jengkol
- Jeruk
- Susu bubuk untuk balita
- Sabun cair/cuci piring



- Bensin

OUTLOOK EKONOMI DAN KEUANGAN 2025

Artikel OJK 2024 berjudul *Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025*, sumber OJK Institute, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut.

- Indonesia berhasil melalui tahun 2024 dengan performa yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2024 didukung oleh keberlanjutan reformasi struktural dan stabilitas sektor keuangan. Data *World Bank* menunjukkan pertumbuhan PDB pada kuartal pertama tahun 2024, di mana pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 5,1%, menunjukkan ketahanan ekonomi yang melampaui rata-rata negara berpendapatan menengah. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,0% (yoy), di atas rata-rata pertumbuhan global, dengan stabilitas sektor keuangan yang tercermin dari IHSG yang sempat mencapai rekor tertinggi di level 7.905,39 pada 19 September 2024. Inflasi tercatat naik menjadi 2,8% pada Mei 2024, sementara defisit anggaran diperkirakan meningkat menjadi 2,5% dari PDB. Meski demikian, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% pada 2025

- Memasuki tahun 2025, *World Bank* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis. Namun, perekonomian global diperkirakan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Berdasarkan *World Economic Outlook (WEO)* yang dirilis IMF pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3,2%, sedikit meningkat dari proyeksi tahun 2024 yang sebesar 3,1%. Risiko yang

memengaruhi kondisi global meliputi pelemahan ekonomi China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut, dampak perubahan iklim, serta ketidakpastian suku bunga global.

- Tantangan yang dihadapi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan memengaruhi keuangan negara, antara lain fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Selain itu, resesi global yang mungkin terjadi, juga dapat memengaruhi aliran investasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu menyiapkan strategi pengelolaan bisnis yang adaptif dan berbasis data. Wawasan yang mendalam terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi, dinamika sektor keuangan, serta tantangan dan peluang yang mungkin muncul sangat penting agar dapat menyusun langkah-langkah yang tepat guna menjaga stabilitas dan kinerja bisnis di tahun 2025.
- Memperhatikan hal-hal tersebut, pemahaman mendalam mengenai dinamika ekonomi dan keuangan di tahun 2025 dinilai penting bagi seluruh individu maupun institusi. Mempersiapkan diri menjadi aspek penting untuk menghadapi tren ekonomi yang mungkin terjadi di tahun 2025. Oleh karena itu, *Webinar OJK Institute* bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif kepada para peserta, sehingga mereka dapat menyusun rancangan bisnis yang tangguh, mengelola risiko, dan memanfaatkan potensi yang ada di tahun 2025 secara optimal.

PROSPEK DAYA BELI 2025

The Investor Team , 2024 , menyajikan artikel berjudul *Prospek Daya Beli Masyarakat Tahun 2025 di Era Kebijakan Prabowo*, sumber TheInvestor, PT Indonesia Investa Orgia, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut.

Daya Beli Masyarakat 2024

Tahun 2024 menjadi periode penuh tantangan bagi ekonomi Indonesia, terutama terkait daya beli masyarakat yang melemah. Dimana pada bulan Mei – September 2024 Indonesia mengalami tekanan deflasi bulanan, yang biasanya menjadi indikasi menurunnya permintaan barang dan jasa, akhirnya pada bulan Oktober dan November 2024 Indonesia mencatat inflasi bulanan. Hal ini memberikan sedikit harapan bahwa konsumsi domestik mulai membaik. Namun, permasalahan daya beli yang lemah tetap menjadi fokus utama perbaikan yang akan dilakukan pemerintah.

Untuk mengatasi tantangan ini, Presiden Prabowo mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat.

Pada bulan Mei – September 2024, Indonesia mengalami deflasi bulanan yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini pada bagian kelompok umum di inflasi, penurunan tersebut terjadi karena ada andil inflasi yang cukup besar dari penurunan makanan, minuman, dan tembakau, yang secara tidak langsung ini memperlihatkan kepada kita bahwa tingkat daya beli masyarakat melemah. Dimana pada September 2024, deflasi bulanan mencapai -0,12%, sedangkan andil inflasi dari penurunan makanan, minuman, dan tembakau mencapai -0,17%.

Pada bulan Oktober 2024, Indonesia sudah mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,08%, karena sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik 0,06%, jika dilihat lebih rinci lagi kenaikannya berasal dari meningkatnya permintaan emas perhiasan dengan andil 0,06%.

Pada bulan November kenaikan inflasi bulanan mencapai 0,30% dengan pengaruh terbesar dari sektor makanan, minuman, dan tembakau. Bulan November 2024 terdapat Pilkada, memberi sumbangan positif, Desember 2024 terdapat nataru yang berpotensi kembali meningkatkan daya beli masyarakat.

RAPBN 2025 mencapai Rp3.613,1 triliun. Kebijakan Presiden Prabowo untuk Meningkatkan Daya Beli mencakupi :

1. Kenaikan Upah Minimum Nasional 6,5%.

Kebijakan menaikkan upah minimum nasional sebesar 6,5% diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pekerja, sehingga ketika pendapatan naik maka daya beli juga akan bertambah lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan upah minimum yang lebih tinggi, sektor konsumsi diharapkan pulih lebih cepat.

Pada tahun 2024, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) secara rata-rata nasional juga berada di angka 6,5%, berbeda pada tiap provinsi berdampak negatif berupa kenaikan biaya tinggi pada industri padat karya, dan berpotensi ada kenaikan harga produk, dan probabilitas PHK.

2. Kenaikan Gaji Guru

Mulai tahun 2025, tunjangan guru non-ASN bersertifikasi naik, dimana yang mempunyai sertifikasi sebelum tahun 2024 akan memperoleh kenaikan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, kelompok guru yang memperoleh sertifikasi pada tahun 2024 langsung menerima tunjangan Rp2 juta tanpa melalui tahap Rp1,5 juta.

Guru ASN yang memiliki sertifikasi memperoleh tambahan tunjangan sebesar satu kali gaji pada tahun 2025.

Total anggaran untuk kesejahteraan guru ini mencapai Rp81,6 triliun, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas guru. Tambahan pendapatan membuat para guru mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga mereka.

3. Makan Siang Gratis

Pemerintah merancang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan dengan pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting dengan bantuan UMKM lokal sebagai unit penyedia makanan.

Rancangan anggaran yang dialokasikan untuk program ini di tahun 2025 sekitar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB.

Tenaga kerja yang diharapkan bisa terserap dari pelaksanaan program ini adalah sekitar 0,82 juta pekerja.

Pemerintah berharap MBG menyumbang kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% di tahun 2025, melalui perputaran uang di masyarakat. Uang yang sebelumnya dialokasikan untuk makan siang kini dapat digunakan untuk hal lain, seperti tambahan

pendidikan, kesehatan, atau tabungan. Alokasi untuk tiap orang yang memperoleh makan siang gratis ini mencapai Rp 10 ribu per porsi.

4. Pemutihan Utang Petani dan Nelayan

Presiden Prabowo Subianto akan memutihkan utang 6 juta petani dan nelayan Indonesia. Utang tersebut merupakan utang masa lalu seperti dari krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008 dan lainnya, dengan nominal Rp 10 juta – Rp 20 juta. Program pemutihan tidak mempengaruhi kinerja industri perbankan karena utang tersebut sebenarnya sudah dihapus buku, tidak mempengaruhi angka non performing loan (NPL) dan neraca bank Bank tetap menagih kredit tersebut dengan harapan bisa menambah laba bank. Dengan adanya pemutihan ini, petani dan nelayan yang sebelumnya tercatat sebagai nasabah bermasalah di Bank Indonesia akan dihapus dari daftar NPL, sehingga mereka dapat kembali mengakses pinjaman ke perbankan. Dengan menghapuskan utang mereka, pemerintah berharap kelompok ini dapat meningkatkan produktivitas mereka di sektor pertanian dan perikanan. Manfaat pemutihan ini akan meningkatkan akses terhadap modal yang akan mendorong produktivitas dan hasil panen.

Terdapat 6 juta petani dan nelayan akan kembali meminjam ke bank, bila dengan pinjaman Rp 10 juta saja, atau menyebabkan tambahan Rp 60 triliun peredaran uang di masyarakat, perekonomian akan tumbuh.

5. PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah

Pengumuman kenaikan PPN 12% mulai 2025 sempat menjadi bahan pembicaraan publik, karena daya beli yang sedang melemah, tapi pemerintah malah mau meningkatkan PPN menjadi 12% dari 11%, tentu saja ini bisa tambah menurunkan daya beli masyarakat, karena barang-barang akan tambah lebih mahal.

Kabar yang terbaru, pemerintah membatasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hanya untuk barang-barang mewah. Barang-barang kebutuhan masyarakat kecil seperti kebutuhan-pokok tidak kena kenaikan PPN 12%. Kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan utama sehingga daya beli masyarakat kecil tidak tertekan. Jika melihat data PPN di Asia Tenggara, tahun 2024 ini Indonesia menempati posisi 2 tertinggi.

6. Penurunan Tiket Pesawat Akhir Tahun 2024

Pemerintah melakukan penurunan tarif tiket pesawat di akhir tahun 2024, untuk mendorong mobilitas masyarakat.

Kebijakan ini akan menurunkan tarif tiket pesawat mencapai 10% pada periode [Nataru](#) tahun 2024. Penyesuaian tarif ini berlaku dalam 16 hari, dari 19 Desember 2024 – 3 Januari 2025.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung sektor pariwisata domestik. Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, lebih banyak masyarakat dapat bepergian untuk berlibur, berkunjung ke keluarga, atau menjalankan aktivitas bisnis, berdampak meningkatkan pendapatan maskapai penerbangan dan pelaku usaha pariwisata, seperti hotel, restoran, dan destinasi wisata lokal.

Prospek dan Tantangan sbb :

Prospek daya beli masyarakat Indonesia akan cukup baik tahun 2025 nanti dengan banyaknya kebijakan Presiden Prabowo yang mengarah langsung pada kenaikan daya beli, dan jika dilihat juga mendukung ekonomi masyarakat menengah kebawah, seperti PPN 12% hanya untuk barang mewah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2% pada tahun 2025.

Kenaikan upah minimum nasional meningkatkan beban operasional perusahaan, terutama di sektor padat karya, berdampak pada PHK dan lapangan-kerja. La Nina menyebabkan curah hujan lebat terjadi berkepanjangan di tahun 2025, dengan prediksi terjadi dari akhir tahun 2024 ini sampai bulan April 2025, potensi panen sektor petani terganggu, berdampak negatif pada perekonomian 2025. Perang dagang antara Amerika Serikat dan RRTiongkok, berpengaruh karena mitra dagang terbesar Indonesia adalah RRT.

STRATEGI PEMELIHARAAN DAYA-BELI NASIONAL

Alf, 2025, menyajikan artikel berjudul *Inflasi Terkendali, Pemerintah Terus Jaga Daya Beli Masyarakat*, sumber IKPI, sekretariat@ikpi.or.id, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut.



Inflasi pada Januari 2025 tercatat turun menjadi 0,76% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan 1,57% pada Desember 2024. Secara bulanan, terjadi deflasi sebesar 0,76% (mtm), yang terutama didorong oleh program diskon tarif listrik di tengah kenaikan harga beberapa komoditas pangan akibat musim hujan.

Kebijakan program diskon tarif listrik sebesar 50% kepada sebagian besar

pengguna merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Kebijakan ini berdampak positif sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Meski inflasi keseluruhan terkendali, inflasi inti tetap menunjukkan tren penguatan, mencapai 2,36% (yoy), mencerminkan permintaan yang masih tumbuh. Beberapa kelompok yang mengalami kenaikan harga antara lain pakaian dan alas kaki, pendidikan, peralatan rumah tangga, perawatan pribadi, dan jasa lainnya.

Sementara itu, komponen harga yang diatur Pemerintah mengalami deflasi sebesar 6,41%, terutama karena program diskon tarif listrik. Normalisasi tarif transportasi pasca-libur Natal dan Tahun Baru, seperti tarif kereta api dan angkutan udara, juga berkontribusi pada menurunnya inflasi di sektor jasa angkutan penumpang.

Pemerintah terus berupaya menjaga inflasi tetap terkendali guna mendukung daya beli masyarakat, terutama dalam menjamin akses pangan. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pemerintah secara konsisten menjalankan kebijakan untuk menjaga stabilitas inflasi pangan, termasuk meningkatkan produksi dan memperkuat cadangan pangan guna mencapai ketahanan pangan. Dalam mempersiapkan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri, Pemerintah akan terus memitigasi risiko gejolak harga yang mungkin terjadi.

Dengan kebijakan yang tepat dan sinyal positif dari sektor manufaktur serta konsumsi, Indonesia optimistis menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2025 dengan pertumbuhan yang solid.

Mengawali tahun 2025, sektor manufaktur Indonesia menunjukkan kinerja yang solid dengan Purchasing Managers' Index (PMI) mencapai 51,9 pada Januari, naik dari 51,2 di Desember 2024. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Juni 2024, didorong oleh meningkatnya produksi serta permintaan baru dari pasar domestik dan ekspor.

Kenaikan PMI manufaktur ini menjadi sinyal positif mengawali tahun 2025. Momentum ini akan terus dijaga. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kinerja sektor riil serta mendukung kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan industri. Perkembangan sektor manufaktur sejalan dengan tren ekspansi konsumsi dan dunia usaha sejak akhir tahun lalu. Pada Desember 2024, Indeks Penjualan Riil (IPR) meningkat 1,0% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan November yang sebesar 0,9%. Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dirilis Bank Indonesia berada di level ekspansif 127,7 pada Desember, naik dari 125,9 di bulan sebelumnya.

Dari sisi dunia usaha, konsumsi listrik industri tumbuh signifikan 4,3% (yoy), meningkat dari 1,5% di bulan sebelumnya. Optimisme pelaku industri terhadap prospek 2025 semakin kuat, terlihat dari meningkatnya permintaan yang mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja serta meningkatkan stok bahan baku dan barang jadi guna mengantisipasi lonjakan penjualan.

Di tingkat global, beberapa mitra dagang utama Indonesia juga menunjukkan ekspansi manufaktur, seperti India (58,0), Amerika Serikat (50,1), dan Tiongkok (50,1). Namun, sebagian besar negara ASEAN masih mengalami kontraksi, di antaranya Thailand (49,6), Vietnam (48,9), dan Malaysia (48,7).

PANDANGAN BERBAGAI PAKAR ILMU EKONOMI

Lazuardi., 2025, menyajikan artikel berjudul Ekonom UGM Minta Pemerintah Antisipasi Tren Daya Beli Masyarakat Menurun, antara lain menyatakan bahwa pelemahan daya beli masyarakat diperkirakan masih menghantui perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 ini. Pasalnya krisis global yang belum sepenuhnya pulih semenjak pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebabnya. "Kondisi global juga menghadapi krisis seperti krisis ekonomi, energi, dan geopolitik. Tentunya, Indonesia sebagai bagian dari perekonomian global, maka dampak berbagai level itu pasti terdampak dan ini sesuatu yang jelas menyebabkan berbagai tekanan ekonomi bagi menurunnya kemampuan daya beli masyarakat," kata Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi (SV) UGM, Yudistira Hendra Permana, S.E., M.Sc., Ph.D., Sabtu (15/2)

Dampak krisis yang terjadi pascapandemi menurutnya tidak langsung dirasakan pada tahun 2022, tetapi baru dirasakan sekarang. Namun, yang menjadi krusial adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut terjadi pada tahun 2024 dan 2025. “Kita lihat terjadi deflasi secara gradual sampai hari ini. Kondisi yang sempat membaik di akhir tahun memunculkan optimisme, namun momentum Pilkada dan libur natal dan tahun baru tidak akan berlangsung lama,” tegas Yudistira.

Yudistira menyebutkan angka pertumbuhan ekonomi pasca pandemi covid-19 stagnan di sekitar lima persen sehingga kondisi ekonomi Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan kondisi lapangan pekerjaan dan upah yang tidak terjamin membuat masyarakat merasakan ketidakpastian yang cukup tinggi. “Kondisi ini membuat masyarakat lebih waspada dalam membelanjakan uangnya dan menahan konsumsi,” paparnya.

Ketidakpastian ekonomi ini menurut Yudistira menyebabkan masyarakat menahan tingkat konsumsi seperti bahan pangan hingga bahan tersier. “Ketika permintaan menurun, produsen juga akan berhitung yang dapat berdampak pada layoff pegawai, PHK, dan sebagainya,” tambahnya.

Yudistira menyebut masa-masa seperti sekarang ini, masyarakat dan pemerintah perlu waspada dan melakukan antisipasi sebab tren menurunnya kemampuan daya beli ini akan berdampak jangka panjang bila tidak diurus dengan baik. Momen bulan puasa dan lebaran ini menurutnya bahkan dapat menjadi salah satu pembuktian sebab biasanya tingkat konsumsi naik pada momen ini. Namun, ia memperkirakan yang terjadi pada bulan puasa tahun ini akan sedikit berbeda daripada biasanya. “Menurut saya, tahun ini akan sedikit berbeda pola konsumsi umumnya. Masyarakat lebih akan menyimpan dananya sampai akhir tahun lagi,” jelasnya.

Berbagai hal strategis harus dilakukan guna mengantisipasi menurunnya tingkat daya beli masyarakat, salah satunya dengan memangkas anggaran perjalanan dinas dan seremoni yang sekarang sedang ramai dibahas. “Tentunya biaya perjalanan dinas dan seremoni bisa dipangkas, tetapi kalau kemudian faktanya seperti ada glamping untuk kepala daerah yang baru dilantik menunjukkan bahwa cara-cara pemerintah tidak berubah, tidak ada pikiran untuk mitigasi dan sense of crisis-nya,” ujarnya.

Pengetatan anggaran ini menurutnya memang perlu dilakukan. Namun, relokasi anggaran perlu dilakukan dengan tepat. Salah satu yang disorot Yudistira adalah komposisi kabinet yang saat ini cukup ‘gemuk’ dengan penambahan beberapa kementerian menambah jumlah pos anggaran.

Selain itu, Yudistira juga menekankan pengetatan anggaran pun dapat diterapkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye politik Prabowo. Anggaran program ini menurutnya juga dapat dipertimbangkan kembali sebab pelaksanaannya yang masih belum matang dilihat dari aspek anggaran negara yang belum stabil. “Adanya pengetatan anggaran MBG ini pun sebenarnya perlu diperhatikan sebab sekarang anggaran pendidikan dan kesehatan terkena imbasnya dan dianggap hanya sebagai sektor penunjang saja,” imbuhnya.

Yudistira menyebut anggaran pendidikan dan kesehatan seharusnya tidak dipangkas, sebab pembangunan SDM di masa mendatang ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesehatan

SDM. “Untuk landasan transformasi yang dibangun adalah modal manusianya melalui pendidikan dan kesehatan, jadi jangan sampai anggarannya dipotong,” harap Yudistira.

Imam Suhartadi, 2024, menyajikan artikel berjudul *2025, Pemulihan Daya Beli Masyarakat Harus Jadi Agenda Prioritas Pemerintah*, sumber investor.id, antara lain mengungkapkan bahwa peneliti Senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS), M Aminudin yang akrab disapa Gus Amin mengatakan, agenda penting mendesak pada 2025 yang harus dijalankan pemerintah adalah memulihkan daya beli masyarakat dan membangkitkan kembali gairah dunia usaha. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menurunkan harga BBM dan pajak. Secara umum tidak ada gejolak politik yang berarti dalam pesta demokrasi Indonesia 2024 menunjukkan kedewasaan politik bangsa Indonesia semakin bagus. Rekonsiliasi merupakan ide yang bagus tapi dalam bentuk rekonsiliasi kebijakan negara agar kembali ke rel kemaslahatan rakyat. *Pemerintah harus segera mengembalikan haluan kebijakan ekonomi yang lebih Pro-Poor dan Pro-Nasional sesuai amanah konstitusi terutama pembukaan UUD 1945 dimana tujuan berdirinya negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum atau rakyat.*



“Jika tidak ekonomi makin memburuk seperti Sri Lanka 2022 karena terlilit hutang terjadi ledakan sosial ekonomi terjadi *chaos* ekonomi politik. Padahal hutang Indonesia saat ini 1.000% lebih banyak dari Sri Lanka,” kata Gus Amin kepada *Investor Daily* di Jakarta, baru-baru ini.

Staf Ahli DPR-RI 2008/2009 ini mengatakan, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari - Desember 2024.

Sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan jumlah pekerja yang mengalami PHK mencapai lebih kurang 80.000 orang. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan total pekerja ter-PHK sepanjang tahun 2023 yang berkisar 60.000 orang.

“Jika rata-rata setiap PHK 80.000 dalam 10 tahun terakhir ada sekitar 1 juta orang mengalami PHK. Ini berarti ekonomi Indonesia sedang berkontraksi. Ini membawa kecemasan bagi kelas menengah ke bawah,” katanya.

Kelas Menengah Terpuruk

Memburuknya perekonomian Indonesia, lanjut dia, diperlihatkan dari data jumlah kelas menengah. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang diolah oleh Bank Mandiri dalam *Daily Economic and Market* (Juli 2024), proporsi kelas menengah pada struktur penduduk Indonesia pada 2023 cuma 17,44%. Jumlah ini anjlok dari proporsi pada 2019 yang mencapai 21,45%. “Jadi makin banyak kelas menengah jatuh miskin,” kata Gus Amin.

Menurut dia, hal ini terjadi karena kesalahan kebijakan ekonomi makro pemerintah pusat. Hampir semua kelompok kelas termasuk kelas menengah semakin terpuruk.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 9,48 juta kelas menengah di Indonesia turun tingkat menjadi rentan miskin.

Pada 2019, jumlah kelas menengah di Indonesia sekitar 53,33 juta orang atau sekitar 21,45% dari total penduduk. Namun, pada 2024 jumlah itu menurun menjadi tinggal 47,85 juta atau tinggal 17,13% dari total penduduk.

Berkurangnya kelas menengah itu bukan karena mereka naik kasta menjadi kelas atas atau kelompok orang kaya, namun justru berkurang karena mereka turun menjadi kelompok masyarakat miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 9,48 juta kelas menengah di Indonesia turun tingkat menjadi rentan miskin.

Begitu pula dengan jumlah kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 54,97 juta orang atau 20,56% di 2019 menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk di 2024. Kondisi itu diikuti oleh bertambahnya jumlah kelompok miskin Indonesia.

Kenaikan BBM

Menurut dia, memburuknya perekonomian rakyat Indonesia di tengah ekonomi Asia yang baik dan maju disebabkan dua hal yaitu mahalunya BBM dan pajak yang tinggi.

Pertama, harga energi kian mahal terutama BBM bersamaan dengan mahalunya harga pupuk petani. Naiknya angka kemiskinan pada 2022 tidak lepas dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM awal Maret 2022 dengan rata-rata kenaikan sebesar 30%.

Setelah kenaikan BBM itu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa angka kemiskinan meningkat. Menurut data BPS, pada September 2022 angka kemiskinan sebesar 26,36 juta orang. Jumlah ini meningkat 0,20 juta orang dari bulan sebelumnya, Maret 2022.

Kenaikan BBM selalu memperburuk ekonomi rakyat, karena mendorong kenaikan harga yang lain. Kenaikan BBM memiliki mutipler effect lebih 25%.

“Itu juga terjadi pada bulan Maret 2005 terjadi kenaikan harga bensin 32,6% dan solar naik 27,3%, dan pada bulan Oktober harga bensin kembali dinaikkan 87% dan solar 104%, kemudian mendorong naiknya inflasi hingga 11,7%,” jelasnya.

Kenaikan harga BBM meningkatkan kemiskinan periode 2005- 2016 yakni dari 15,97 % meningkat 17,75%. Pada tahun 2013-2014, pemerintah juga memutuskan menaikkan BBM sebanyak 2 kali dengan harga bensin di tahun 2013 naik 44,4% dan solar naik 22,2% pada Juni 2013.

Tahun 2014, kata Gus Amin, harga bensin kembali naik 30,8% dan solar menanjak 36,4%. Kebijakan ini pun membuat kemiskinan makin bertambah, orang miskin pada Maret 2013 sebesar 28,07 juta jiwa, naik jadi 28,28 juta jiwa, pada Maret 2015 melonjak 28,59 juta jiwa.

Kenaikan BBM tidak hanya berdampak kenaikan harga kebutuhan yang lain tapi mendorong inflasi dan memukul daya beli masyarakat sehingga ekonomi rakyat dan dunia usaha suram.

Menurut dia, solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi rakyat adalah segera menurunkan harga BBM, listrik dan elpiji serta semua pajak terutama pajak PBB untuk pertanian dan kendaraan roda dua dan empat yang memiliki cc kecil.

Harga BBM Indonesia termasuk termahal di dunia terutama dibandingkan negara lain yang masih memiliki produksi minyak walaupun lifting produksi minyaknya separuh atau lebih.

Sebagai contoh BBM Ron 95 pada 21, November 2024, 2.05 ringgit per liter setara Rp 7,292 . Sedangkan Ron 92 jauh lebih baik dari Peralite Indonesia Ron 90.

“Tapi walaupun Petronas Malaysia menjual BBM jauh lebih murah dari Indonesia. Keuntungannya biasanya sekitar 500% lebih banyak dari Pertamina Indonesia,” katanya.

Apalagi menjelang penghujung tahun 2024 ini harga minyak dunia merosot tajam sekitar US\$ 70 per barel. Menurut dia, seharusnya Peralite dijual dibawah Rp 7.500 karena waktu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyo 2010-2014 Minyak dunia berkisar US\$ 110/ per barel BBM di Pertamina dijual Rp. 6500/ per liter tapi APBN per tahun rata-rata surplus di atas Rp 64 triliun.

“Penurunan harga BBM bensin di bawah Rp 7.500 adalah keharusan. Itu adalah jalan terpenting untuk menyelamatkan perekonomian rakyat Indonesia dan dunia usaha yang semakin terpuruk karena tercekik harga BBM dan pajak yang tinggi,” katanya.

Pajak Terlalu Tinggi

Dia menilai, masalah yang dihadapi perekonomian Indonesia, salah satunya adalah pajak yang terlalu tinggi. Karena itu, dia menilai wajar, jika ada reaksi penolakan yang meluas dari masyarakat, dan para pelaku usaha pada kenaikan PPN menjadi 12%. *Menurut dia, kenaikan itu sudah diluar batas kewajaran.*

“Mengapa Indonesia harus dinaikkan hingga 12%, sedangkan negara lain menerapkan tarif PPN 9%, Thailand 7%, dan Myanmar 7%., Timor Leste hanya 2,5%,” ujarnya.

Brunei, kata dia, menjadi satu-satunya negara di Asean yang tidak memungut PPN kepada warganya tapi ekonominya jauh lebih makmur dibanding negara lain di wilayah Asean ataupun belahan dunia lainnya.

“Pajak di Indonesia selalu tinggi tapi segi pertumbuhan ekonomi termasuk terendah di dunia yakni selalu dibawah 5% setelah tahun 2014 jauh dibawah Vietnam hampir selalu diatas 7%, Myanmar, India apalagi Irak dan Saudi Arabia yang sempat di atas 11% yang rata-rata di atas 6%,” katanya.

Harga BBM dan pajak yang tinggi namun ekonomi merosot menunjukkan kebijakan ekonomi yang salah arah.

Menurut dia, dengan menurunkan pajak maka daya beli masyarakat akan meningkat kembali, sektor riil akan menggeliat kembali, dan investor makin banyak datang ke Indonesia karena pasar makin kuat menyerap barang dan jasa lebih baik lagi.

“Dengan menurunkan pajak dan harga BBM akan menekan korupsi lebih baik. Pemerintah bisa mendapatkan pemasukan baru, pendapatan negara dengan melakukan efisiensi birokrasi, memotong gaji pejabat tinggi seperti yang dilakukan Singapura, Inggris dan Amerika saat menghadapi krisis 2009,” katanya.

Disisi lain, Pemerintah Prabowo juga dapat melakukan perburuan harta dan aset di dalam dan luar negeri milik koruptor sejalan dengan pengungkapan kasus-kasus besar korupsi.

Reporter: Siti Masitoh , Editor: Tri Sulistiowati, menyajikan artikel berjudul *Indef: Indikasi Deflasi Januari 2025 Mencerminkan Lemahnya Daya Beli*, sumber KONTAN.CO.ID – JAKARTA, antara lain menyatakan bahwa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, indeks harga konsumen (IHK) mencatatkan deflasi sebesar 0,76% *month to month* (MtM) pada Januari 2025, artinya, terjadi penurunan IHK dari 106,90 pada Desember 2024, menjadi 105,99 pada Januari 2025. Kepala *Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) M Rizal Taufikurrahman menyampaikan, deflasi pada Januari 2025 tidak sepenuhnya dipengaruhi diskon tarif listrik sebagaimana yang disampaikan oleh BPS. Untuk diketahui, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pengguna daya listrik dibawah 2.200 VA selama Januari-Februari 2025. “Dengan melihat tren konsumsi masyarakat dan tekanan ekonomi global, ada indikasi kuat bahwa deflasi ini juga mencerminkan lemahnya daya beli, bukan sekadar turunnya harga karena faktor teknis” tutur Rizal kepada Kontan, Senin (3/2). Rizal memperkirakan, apabila masyarakat sudah mulai menahan belanjanya, maka roda ekonomi dikhawatirkan melambat, investasi melemah, dan dunia usaha akan tertekan akibat turunnya permintaan. Jika kondisi ini terus berlangsung, Rizal khawatir kondisi perekonomian Indonesia berpotensi mengalami perlambatan lebih dalam. Menurutnya, *deflasi yang berlanjut bisa menciptakan lingkaran setan*, yang mana masyarakat menunda konsumsi karena ekspektasi harga akan terus turun, bisnis kehilangan insentif untuk ekspansi, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi stagnan atau bahkan negatif. “Ini sangat berbahaya, terutama jika ditambah dengan sektor industri yang lesu dan ketidakpastian global yang masih tinggi,” ungkapnya. Melihat kondisi tersebut, Rizal bilang, pemerintah tidak bisa hanya berdiam diri dan menganggap deflasi ini sebagai fenomena sementara. Sebab, *jika daya beli terus melemah, maka dampaknya akan sangat serius terhadap investasi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan*.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ia menyarankan agar pemerintah segera bertindak dengan strategi yang konkret.

- *Pertama*, kebijakan fiskal harus lebih agresif dalam mendorong konsumsi, misalnya dengan menyalurkan bantuan langsung tunai yang lebih terarah ke kelompok masyarakat yang paling terdampak.
- *Kedua*, stimulus terhadap sektor riil harus diperkuat, baik melalui insentif pajak bagi UMKM dan industri padat karya maupun kebijakan yang mendorong investasi lebih cepat.
- *Ketiga*, pemerintah harus memastikan stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok, karena jika deflasi terjadi sementara harga-harga pokok masih tinggi bagi kelompok berpenghasilan rendah, maka ketimpangan ekonomi justru akan memburuk.
- *Keempat*, sinyal kebijakan moneter harus selaras dengan kebijakan fiskal, yang mana suku bunga dan likuiditas di pasar keuangan harus tetap mendukung ekspansi ekonomi, sebaliknya tidak memperburuk situasi dengan kebijakan yang terlalu ketat.

“Jika langkah-langkah ini tidak segera diambil, maka bukan tidak mungkin deflasi ini menjadi awal dari perlambatan ekonomi yang lebih serius di 2025,” tandasnya.

Dion Saputra Arbi, pengamat ekonomi UGM, 2025, menyajikan artikel berjudul *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025*, sumber detikNews, antara lain menyatakan bahwa ekonomi Indonesia saat ini diuji di persimpangan jalan. Masa kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki sejumlah harapan besar dan tantangan yang tidak mudah.

- Dalam sektor domestik, daya beli masyarakat terus menurun terbukti deflasi yang dihadapi Indonesia selama lima bulan (Mei-September) terakhir (detikcom, 2024) dan tantangan baru pada awal 2025 yakni kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kategori mewah 12% menjadi momen yang berat untuk meningkatkan ketangguhan ekonomi nasional.
- Secara umum, tahun 2024 menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia sedang *tidak baik-baik saja*. Ekonomi terjadi stagflasi (mandek); masih tingginya gelombang PHK di sektor manufaktur dan masih tingginya angka kemiskinan menjadi hambatan bagi Indonesia melesat menjadi negara maju.
- Oleh karena itu, besar harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dengan beberapa gebrakan awalnya dalam 100 hari pertama menjabat yakni



1. penghapusan utang petani
 2. pelaksanaan program prioritas pembangunan SDM unggul
 3. meningkatkan gaji guru
- menjadi harapan besar pada 2025 ini Indonesia mampu melesat meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi.

- Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup berat bagi Indonesia setelah pandemi COVID-19 terlewati. Sesuai proyeksi pada akhir 2023

sebelumnya, *stagnasi ekonomi terjadi dan tidak terelakkan*. Berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi seperti tingginya gelombang PHK pada 2024 sebanyak 80.000 orang dibandingkan pada 2023 berkisar 60.000 orang memerlukan langkah strategis dan antisipatif untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja yang berdaya saing.

- Persoalan konflik Timur Tengah dan Rusia-Ukraina masih menjadi ancaman bagi Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi pada 2024.
- Persoalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal 2025 menjadi polemik di tengah masyarakat yang dirasakan beratnya jika diimplementasikan. Apabila diimplementasikan, berbagai risiko yang terjadi seperti kontraksi pertumbuhan ekonomi dikarenakan pengetatan konsumsi masyarakat untuk lebih berhemat, investasi stagnan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ekonomi Indonesia saat ini menghadapi beberapa persoalan serius yang harus segera diatasi.

- Di antaranya penurunan daya beli masyarakat secara signifikan khususnya masyarakat kelas menengah jatuh rentan miskin, tingginya angka pengangguran (4,91%) pada Agustus 2024 naik 4,40 juta orang dibanding Agustus 2023 (BPS, 2024), serta

- Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar dengan indeks gini sebesar 0,379 pada Maret 2024 membuktikan pemerataan pendapatan nasional masih sulit diwujudkan. Hal tersebut sangat terkait dengan stagnasi ekonomi yang terjadi pada 2024, di mana
 - a. Sektor manufaktur mengalami gelombang PHK besar-besaran, sementara sektor lainnya belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.
 - b. Di sisi lain, ketidakpastian global, seperti ketegangan politik dan ekonomi di Timur Tengah turut memberi dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan energi domestik.

Untuk itu, pemerintah perlu

- memprioritaskan program penguatan daya beli masyarakat melalui peningkatan sektor ekonomi riil,
- menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor-sektor yang potensial seperti teknologi digital dan lain-lain, serta
- memastikan keberlanjutan distribusi barang dan jasa yang stabil.

Proyeksi perekonomian pada 2025 dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi makroekonomi dua hingga tahun sebelumnya.

- Skenario yang memungkinkan terjadi adalah *skenario moderat*, yaitu
 - a. ekonomi hanya mampu tumbuh 4-5% di bawah target,
 - b. meningkatnya persentase angka kemiskinan dari penduduk rentan miskin (1-1,5%),
 - c. masih terjadi gelombang PHK di sektor industri manufaktur walaupun dapat ditekan dengan berbagai intervensi kebijakan pemerintah dari belanja pemerintah, serta
 - d. terjadinya peningkatan inflasi komoditas pokok.
- *Peningkatan inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya harga barang yang ditanggung oleh produsen dan sebagian konsumen dari peningkatan PPN pada awal tahun ini jika diimplementasikan.* Namun, ada beberapa faktor yang bisa dioptimalkan agar target pembangunan ekonomi tercapai lebih optimistis.

Pertama, berupaya mengurangi ketidakpastian ekonomi dengan *pembangunan ekonomi lebih inklusif* yang selama ini menjadi hambatan bagi investor domestik maupun internasional.

Kedua, langkah-langkah strategis untuk mendukung sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti

- a. digitalisasi dan
- b. ekonomi hijau, bisa membantu meningkatkan perekonomian nasional.
- c. Selain itu, upaya untuk memperbaiki iklim investasi dengan pemberian insentif bagi sektor-sektor inovatif diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing yang dapat menggerakkan roda perekonomian.

Namun, proyeksi ini tetap mengharuskan pemerintah untuk menghadapi *sejumlah tantangan besar* dalam menjaga

- a. stabilitas harga dan mengatasi ketimpangan sosial yang semakin lebar serta

- b. pembangunan ekonomi masih tumbuh di bawah target. Skenario terburuk yang bisa terjadi adalah terjadinya penurunan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi jika kebijakan pemerintah tidak berjalan sesuai harapan, seperti potensi dampak buruk dari kenaikan PPN yang menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga pada 2025 ini.

Artikel 2024 berjudul *Pusing! 7 Hal Ini Bikin Warga RI Makin Susah di 2025*, sumberRevo M, CNBC Indonesia, antara lain mengungkapkan situasi ; Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin ini istilah yang akan menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia pada 2025. Banyaknya kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif bisa semakin menekan daya beli masyarakat di tahun depan.

Sebagai informasi, daya beli masyarakat Indonesia semakin melemah, khususnya pada kelompok kelas menengah ke bawah.

Pemerintah harus segera menyiapkan respons kebijakan agar kelompok tersebut tidak semakin jatuh dan tenggelam.

"Daya beli kelas menengah bawah semakin lemah," ungkap Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro dalam agenda BIRAMA (Bank Indonesia Bersama Masyarakat) di Gedung BI, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Menurut Andry, apabila dua kelompok digabung maka memang tidak terlihat ada permasalahan sebab daya beli kelas menengah atas terus naik. Sangat berbeda dibandingkan dengan kelas menengah bawah. Kalangan kelas menengah ke bawah sangat rentan goyang dengan situasi global saat ini.

- Misalnya pergerakan nilai tukar. Selama tahun 2024, rupiah bergerak cukup liar baik ketika melemah maupun dalam tren penguatan.
- Tidak sampai disitu, tekanan lain muncul dari lonjakan harga barang pokok, misalnya beras. Menurut Andry komponen beras akan menekan keuangan masyarakat kelas menengah.
- Di samping juga biaya tambahan yang muncul karena kebijakan pemerintah. "Penurunan daya beli kelas menengah ke bawah karena terlalu banyak biaya yang dikeluarkan," ujarnya.
- Kondisi yang kurang baik ini berpotensi semakin parah pada 2025 mengingat pemerintah memberlakukan hal-hal yang semakin menekan daya beli masyarakat di tengah kondisi Tanah Air yang masih terus mendapatkan tekanan dari global.

Berikut ini daftar kebijakan pemerintah pada 2025 yang semakin menggerus dompet masyarakat.

1. PPN 12%

Pemerintah telah menegaskan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 akan dikenakan hanya untuk barang mewah. Atas kebijakan ini, kalangan pengusaha masih bingung dengan penentuan barang yang bakal terkena PPN 12%. Kendati terbatas, kenaikan PPN tetap saja membebani sebagian kelompok masyarakat di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPINDO) Haryanto Pratantara mengaku belum mendapatkan keterangan yang jelas mengenai regulasi ini.

"Perlu dijelaskan mengenai definisi barang mewah, ini apa mengacu pada Permenkeu 11/2023 atau akan dibuat definisi baru, misal kategori tas dan sepatu, gimana mengkategorikan yang mewah atau biasa? karena rangenya luas sekali, mulai puluhan ribu sampai ratusan juta, apa dari sisi harga dibedakan?" katanya kepada *CNBC Indonesia*, dikutip Selasa (10/12/2024).

2. Kebijakan Opsen

Kebijakan opsen atau pungutan tambahan pajak dari pemerintah daerah mendapat pertentangan dari industri kendaraan. Pasalnya kebijakan ini bakal membuat harga kendaraan bakal lebih mahal.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara memperkirakan kenaikan harganya bakal cukup besar.

"Ya naik lumayan sih, antara Rp 15-20 juta tergantung dari jenisnya kan. Tergantung daerahnya juga. Opsen itu berat buat masyarakat. Kelompok-kelompok yang beli mobil harga Rp 250 juta sampai 300 juta itu kelompok-kelompok yang sangat sensitif terhadap harga," katanya kepada *CNBC Indonesia*, Jumat (6/12/2024).

"Ada naik 1 juta, 2 juta juga tuh *kerasa*, apalagi sampai puluhan juta. Rp 1 juta juga sudah berat, apalagi lebih dari itu," kata Kukuh.

"Karena wewenang mereka dan itu harus jalan katanya. Kita bilang ya kalau mau tetap diterapkan, berilah stimulus. Supaya penjualan tetap bisa terjaga," sebut Kukuh.

"Dalam kondisi yang berat, nah mereka mau menerapkan tambahan pajak yang juga gak kecil gitu. Jangan nanti berharap volumenya naik, kita pertahankan aja udah bagus. Dengan bisnis as usual ya, kalau ditambahin opsen lagi semakin terpuruk lagi. Itu aja yang kami sampaikan ke pemerintah daerah ya," lanjutnya.

3. Asuransi Wajib Motor-Mobil

Asuransi Third Party Liability (TPL) bagi kendaraan bermotor ditargetkan akan diwajibkan pada semester II-2025 mendatang. Namun, pemerintah dinilai masih *wait and see* terkait pemberlakuan aturan ini.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan, proses pembentukan aturan masih jauh panggang dari pada api. Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) terkait TPL belum juga keluar.

"Takutnya bisa mundur (pemberlakuan TPL-nya) karena inflasinya belum bisa ditekan, daya beli masyarakat masih berat," ungkap Budi saat ditemui usai Konferensi Pers AAUI, di Jakarta, Rabu, (4/12/2024).

"Kalau TPL ini kan tidak pakai APBN, tapi dari iuran masyarakat. Kalau kondisi tidak baik-baik, ini pasti akan jadi huru-hara dan kami tidak mau ada hal itu," tuturnya.

Kendati demikian, Budi menekankan pentingnya pemberlakuan asuransi wajib TPL bagi pemilik motor dan mobil secepatnya. Pasalnya, Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang belum menerapkan asuransi wajib TPL.

Sejauh ini, AAUI terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait mekanisme pemberlakuan asuransi TPL wajib tersebut. Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain Jasaraharja, Korlantas, dan Kementerian dan Lembaga lainnya.

4. Iuran BPJS Kesehatan

Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berpotensi naik 2025 nanti. Meski, menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, hal itu tidak bisa dipastikan sekarang karena bukan wewenangnya.

Dia menjelaskan, dalam Pasal 103B Ayat 8 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025.

"Anda baca di Perpres 59. Dievaluasi, lalu nanti di maksimum 1 Juli 2025. Nah, itu iurannya kemudian tarif dan manfaatnya akan ditetapkan," kata Ghufron usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Sabtu (6/12/2024).

Namun, imbuh dia, penetapan iuran peserta JKN akan naik atau tetap adalah wewenang pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri mengatakan iuran BPJS belum tentu akan dinaikkan pada 2025. Namun, semuanya masih harus dihitung.

Selain itu, sistem Iuran BPJS Kesehatan juga akan berubah. Sejalan dengan diterapkannya sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 mulai Juli 2025

5. Harga Rokok Naik

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani memastikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 tidak akan naik. Namun, harga jual eceran (HJE) dipastikan akan tetap meningkat.

Kenaikan HJE pada tahun depan ia pastikan akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menurut Askolani, sudah disiapkan dua PMK untuk mengatur kenaikan HJE 2025, yang saat ini tengah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum., Jakarta, Rabu (11/12/2024).

6. Potensi Kenaikan BBM

Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.

Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.

Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.

7. Potensi Kenaikan LPG

Selain berencana memangkas subsidi BBM, pemerintah juga berencana untuk memangkas subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau gas Elpiji ukuran 3 kg. Bahkan, subsidi tersebut direncanakan akan dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Banyak Beban Baru di 2025, Perencana Keuangan: Bisa Turunkan Daya Beli, sumber kumparanBISNIS, antara lain menyatakan bahwa memasuki 2025, masyarakat Indonesia harus menerima berbagai beban baru sehingga memungkinkan rupiah yang dikeluarkan bertambah. Sebab, di 2025 ada beban baru yang harus dihadapi masyarakat mulai opsen pajak kendaraan bermotor, kenaikan harga rokok, hingga kewajiban asuransi Third Party Liability (TPL).

Perencana Keuangan Andy Nugroho melihat, hal ini dapat membuat penurunan daya beli masyarakat semakin dalam. “Dengan adanya berbagai macam beban pengeluaran yang naik di tahun 2025 tentu berdampak pada daya beli masyarakat yang akan menurun,” kata Andy



kepada kumparan, dikutip Jumat (3/1). Hal ini dikarenakan beban-beban tambahan ini masuk ke dalam kategori pengeluaran yang bersifat wajib. Dia juga melihat rokok sebagai salah satu kebutuhan penting bagi sebagian orang, sebab ketika harganya naik banyak yang rela menunda pembelian kebutuhan lain demi rokok. Dengan demikian, beban baru ini membuat target pertumbuhan ekonomi 8 persen

atau proyeksi 5,2 persen di 2025 dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2025 cukup berat. “Dengan masyarakat mengerem pengeluaran mereka dengan mengurangi konsumsi, secara makro tentu akan berdampak akan sulit mengejar pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan oleh pemerintah,” jelas Andy.

Selain itu, beban baru tersebut membuat masyarakat Indonesia harus pandai mengatur penghasilan sedemikian rupa, agar dapat mengakomodasi semua kebutuhan. Jika tidak, maka masyarakat dinilai perlu memiliki tambahan penghasilan selain pendapatan utama.

Hal ini dikarenakan menurut dia, dari segi pandangan pekerja, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen tidak akan dapat menutupi pengeluaran, jika ditambah dengan berbagai beban baru di 2025. “Yang kemudian harus dilakukan adalah mengatur sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhannya, atau menambah pemasukannya lagi dengan cara lain,” terang Andy. Sebelumnya, mulai 2025 akan ada beban tambahan bagi masyarakat Indonesia, mulai dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen meski untuk barang mewah, pemberlakuan opsen PKB, kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok konvensional dan elektrik, juga asuransi pihak ketiga atau asuransi Third Party Liability (TPL) yang diwajibkan bagi seluruh pemilik kendaraan motor dan mobil.

Laporan Utama CS. Purwowidhu, 2024, berjudul

Ekonom: RAPBN 2025 Optimis dan Realistis, sumber InfografisLaput02.jpeg, antara lain mengungkapkan bahwa di tengah proyeksi stagnasi perekonomian global, pemerintahan Presiden Joko Widodo mematok target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2%, sedikit lebih tinggi dari outlook tahun ini yang sebesar 5,1%.

Dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (16/8/24) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan

- Mengingat kondisi perekonomian global yang diperkirakan relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi tahun depan masih akan bertumpu pada permintaan domestik.
- Beberapa strategi akan ditempuh antara lain dengan menjaga ketat daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan penyaluran bantuan sosial serta subsidi.

Kepala Ekonom Bank Permata memandang optimis target pertumbuhan tersebut.

- Namun, menurut dia upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun mendatang akan cukup menantang.
- Dari sisi global, perlambatan ekonomi yang khususnya dialami oleh mitra dagang utama Indonesia yakni China dan Amerika Serikat akan berdampak pada kinerja perekonomian Indonesia misalnya kinerja ekspor yang cenderung menurun.
- Meskipun di lain sisi, perlambatan ekonomi Amerika Serikat juga dapat berimplikasi pada pelebaran ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia sehingga diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Sebab itu, kebijakan APBN perlu tetap siaga menjadi peredam guncangan untuk memitigasi risiko-risiko yang berasal dari perlambatan ekonomi global sehingga target pertumbuhan bisa tercapai.
- Sekalipun memang ada tantangan yang cukup berat dari kondisi globalnya, namun kami melihat bahwa target pertumbuhan tersebut masih tetap realistis meskipun tadi prasyaratnya adalah pemerintah perlu memastikan **kinerja konsumsi domestik** ini relatif kuat.
- Dukungan APBN untuk menjaga daya beli masyarakat sangat penting karena konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) yakni mencapai 53,18% pada 2023. Apabila konsumsi rumah tangga tetap tumbuh solid di kisaran 5% atau lebih, maka pertumbuhan ekonomi kita pun Josua mengatakan hampir bisa diperkirakan akan solid di atas 5%.

Ekonom CORE Indonesia berpendapat target pertumbuhan 5,2% untuk tahun 2025 relatif lebih realistis. Kendati demikian, menurut pemerintah ke depan perlu mengantisipasi perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.

Pertumbuhan konsumsi tak lepas dari tingkat inflasi. Target inflasi pada RAPBN 2025 direncanakan sebesar 2,5%.

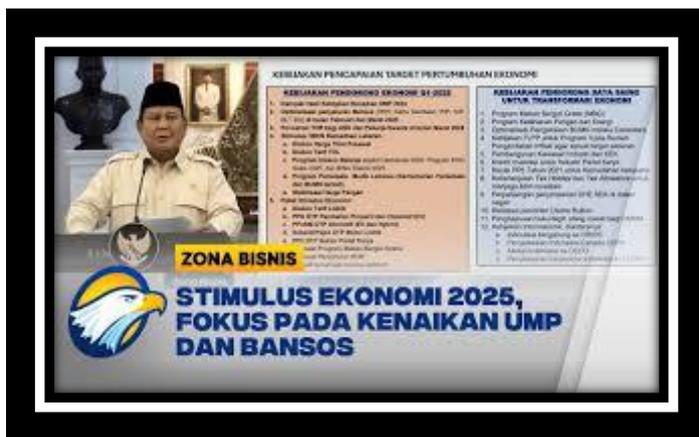
Meskipun sudah relatif menggambarkan situasi kondisi perekonomian inflasi di tahun ini dan juga produksi tahun depan, tetapi dia menggaris bawahi pemerintah perlu mewaspadai perubahan level inflasi, terutama untuk komoditas pangan, karena sepanjang 5 tahun terakhir, inflasi untuk komoditas pangan ini relatif rapuh/volatile, berubah ubah disebabkan oleh kekurangan stok produksi, faktor perubahan iklim yang akhirnya mengubah masa panen dan berdampak terhadap inflasi.

Ekonom lain menyatakan bahwa disamping menjaga level inflasi tetap rendah, pemerintah juga perlu menambah penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat sehingga dapat mendorong tercapainya target pertumbuhan.

Selain konsumsi domestik, potensi investasi juga tetap prospektif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setelah sempat mengalami perlambatan di level 3,79% pada kuartal 1-2024 karena faktor Pemilu, realisasi investasi kembali menanjak di kuartal 2-2024 mencapai 4,43%, yang utamanya ditopang oleh investasi bangunan seperti pembangunan infrastruktur dasar, kawasan industri, jalan tol, dan proyek strategis nasional.

Di samping itu, pembangunan program prioritas lainnya seperti yang berkaitan dengan hilirisasi dan ekonomi hijau juga menjadi magnet tujuan investor global maupun domestik. Dengan adanya stabilitas ekonomi dan bonus demografi di Indonesia, investor pun semakin tertarik untuk menanamkan modal.

Tentu ini menjadi daya tarik buat investasi, ditambah lagi dengan kondisi di mana suku bunga global pun juga cenderung akan mengalami penurunan di tahun depan (2025), sehingga berdampak positif dan meningkatkan daya tarik untuk investasi global masuk ke dalam negeri.



Kondusivitas iklim investasi juga memerlukan kepastian regulasi, pemerintah perlu mempercepat penerbitan peraturan pelaksana dari Undang-undang Cipta Kerja yang terbaru.

Asumsi nilai tukar yang ditetapkan dalam RAPBN 2025 pada kisaran Rp16.100 sudah mengakomodasi peluang perubahan di tahun depan terutama yang disebabkan perubahan konstelasi politik maupun kondisi

geopolitik global.

Tidak masalah ketika target untuk asumsi nilai tukar ini diset lebih tinggi gitu ya dibandingkan proyeksi saat ini, mengingat ini akan mempengaruhi juga target dari penerimaan dan juga belanja. Dan kalau melihat dari kondisi ketidakpastian global tahun depan menurut saya, angka Rp16.100 juga sudah relatif realistis untuk dijalankan oleh pemerintahan terpilih.

Desain postur RAPBN 2025 menekankan optimalisasi pendapatan, belanja berkualitas, dan pembiayaan inovatif. Pagu belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun. Terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun serta transfer ke daerah Rp919,9 triliun.

Agenda prioritas pada RAPBN 2025 mencakup pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, kesehatan, ketahanan pangan, serta hukum dan hankam.

Rancangan fiskal yang disusun pemerintahan saat ini juga telah mengakomodasi program unggulan pemerintahan seperti makan bergizi gratis (MBG) yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program MBG Jokowi mengatakan akan dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel.

Belanja RAPBN 2025 ekspansif, mengakomodasi beberapa program yang tengah dijalankan pemerintahan saat ini dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru sekaligus memfasilitasi program yang ingin dijalankan oleh pemerintahan baru.

Penyesuaian program belanja di tengah keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan tersendiri terutama di masa transisi pemerintahan baru. Kabinet memastikan program baru punya output yang terukur, terutama dalam jangka pendek dan juga selaras dengan target *outcome* jangka panjang, membutuhkan monitoring dan evaluasi yang rutin dan bertahap.

Karena ruang fiskal terbatas, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas belanja.

Penyaluran bansos tetap perlu diperluas untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, rencana belanja jangka pendek seperti ketahanan pangan, pembiayaan rumah yang terjangkau, dan peningkatan permodalan UMKM adalah intensi yang baik, belanja untuk peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, hilirisasi dan transformasi hijau juga sudah tepat sebagai strategi jangka menengah panjang mendukung visi Indonesia emas 2045 agar pendapatan per kapita kita secara nasional bisa meningkat dan kita berhasil keluar dari kelas negara berpenghasilan menengah.

Adapun pendapatan negara dalam RAPBN 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp505,4 triliun.

Kenaikan target pendapatan negara menjadi 12,32% PDB di 2025 dari outlook 2024 yang sebesar 12,27% merupakan kenaikan yang cukup signifikan, pemerintah perlu melihat kondisi ekonomi domestik secara komprehensif dalam menerapkan kebijakan perpajakan yang tidak mengganggu daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Rencana keberlanjutan pemberian insentif berupa PPN DTP menurut Josua merupakan salah satu contoh penerapan kebijakan perpajakan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah.

Target penerimaan RAPBN 2025 lebih moderat sejalan dengan fase normalisasi harga komoditas yang juga perlu diantisipasi pemerintah ke depan.

Reformasi perpajakan dalam kurun satu dekade terakhir menurut akan membuahkan hasil di tahun mendatang. Penerapan Core Tax Administration System misalnya akan memperbaiki infrastruktur perpajakan yang selanjutnya berpotensi meningkatkan penerimaan, peningkatan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak juga akan mendorong penerimaan pajak tahun depan.

Penerapan tarif baru PPN 12%, berpeluang mendorong penerimaan, dengan melihat momentum nan-tepat dalam penerapan tarif PPN tersebut. Karena ketika momentum penerapan tarif ini tidak tepat, maka sekali lagi yang akan terkena dampaknya adalah kelompok masyarakat, terutama kelompok pendapatan menengah ke bawah..

Dengan target pendapatan sebesar Rp3.613,1 triliun dan pagu belanja Rp2.996,9 triliun maka defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau sebesar Rp616,2 triliun. Moderasi defisit fiskal 2025 tersebut sebelumnya direncanakan hingga 2,8% pada pembicaraan awal penyusunan RAPBN 2025 menjadi 2,53%.

Secara keseluruhan gambaran dari RAPBN 2025 adalah ekspansif tetapi masih memperhatikan isu-isu keberlanjutan terutama isu terkait disiplin fiskal itu sendiri. Kebijakan APBN dalam lima tahun ke depan harus bersifat fleksibel. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, dengan asumsi pemerintah terpilih akan tetap komit menjaga disiplin fiskal, maka perlu ada skala prioritas dalam menjalankan program-program jangka pendek maupun jangka panjang.

Pergerakan penerimaan negara juga perlu direspons dengan belanja yang efektif, efisien, dan fleksibel.

- Ketika penerimaan tahun depan mengalami penurunan maka pemerintah bisa membuka kembali opsi realokasi anggaran.
- Pemerintah ke depan juga perlu memikirkan mekanisme pemberian stimulus perekonomian yang berasal dari windfall komoditas, terutama saat indikator perekonomian mulai menunjukkan pelemahan.
- Tidak mudah mencipta program baru bila penerimaan relatif terbatas.
- Pemerintah harus menjalankan disiplin fiskal, realisasi APBN bersifat fleksibel, mampu merespon perubahan kondisi perekonomian terkini, pelaksanaan dijalankan tanpa mengorbankan kelanjutan dari APBN, terutama dalam jangka menengah hingga panjang.

RENCANA STRATEGIS NASIONAL TRIWULAN I 2025

Muhammad Heriyanto, 2025 , menyajikan berjudul *Analisis: Bantuan pemerintah topang daya beli masyarakat kuartal I 2025*, sumber ANTARA/HO-Mirae , antara lain mengungkapkan bahwa pemerintah masih berupaya mendorong daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah melalui beberapa kebijakan, seperti bantuan sosial dan diskon tarif listrik

- Dua program pemerintah yang dapat menopang daya beli masyarakat di kuartal I 2025 yaitu bantuan beras 10 kg dan diskon tarif listrik 50 persen bagi masyarakat kurang mampu.
- Saat ini penyaluran bantuan beras mengalami penundaan untuk menjaga stabilitas harga gabah petani, dan baru akan dilanjutkan setelah Lebaran pada April 2025.
- Diskon tarif listrik telah memberikan dampak signifikan dengan potensi penghematan Rp150.000- Rp170.000 per bulan bagi masyarakat penerima manfaat.
- Selain itu, daya beli kelas menengah ke bawah tertopang oleh program perlindungan sosial yang mencapai Rp38,6 triliun, termasuk kebijakan menunda kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen.
- Daya beli masyarakat akan cukup meningkat pada kuartal I 2025 seiring adanya momentum perayaan Hari Raya Imlek, Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya.
- Penurunan daya beli masyarakat utamanya dialami oleh kelas menengah yang secara jumlah juga semakin menurun.
- Konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan kelas menengah sebagai pendorong utama.

RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI

Penulis mengambil Jateng sebagai studi kasus.

Tika Vilysta Editor, Marnisa Nurdian Saritri, 2025, menyajikan artikel berjudul *Pemprov Jateng Perkuat Daya Beli Masyarakat di 2025*, sumber KBRN, Semarang, antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memperkuat daya beli masyarakat di tahun ini. Apalagi, di tengah ketidakpastian perekonomian dan perang antara Rusia-Ukraina.

Plh Sekda Jateng menyebut upaya menyejahterakan masyarakat tetap digenjut. Hal itu tetap dilakukan meski tren penduduk miskin Jateng menurut Badan Pusat Statistik (BPS) turun signifikan menjadi 9,58 persen

Caranya adalah dengan meningkatkan daya beli mereka, dan menurunkan ketimpangan.

- Jadi mereka harus mempunyai pekerjaan atau punya usaha, sehingga mereka bisa membelanjakan kebutuhan pokoknya dengan aman. Kinerja penurunan kemiskinan membuktikan bahwa program kerja pemerintah selama ini sudah *on the track*. Capaian itu menjadi pelecut kinerja bagi Pemprov Jateng, untuk lebih menyejahterakan masyarakat.
- Ada beberapa program kerja Pemprov Jateng dalam penurunan tingkat kemiskinan antara-lain adalah pemberian bantuan melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) khusus bagi disabilitas, lansia miskin, dan mereka yang tidak produktif karena sakit.
- Pembangunan RTLH, bantuan jamban, sanitasi air bersih, dan sambungan listrik. Tidak lupa, di bidang pendidikan, Pemprov Jateng juga memastikan agar anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan.
- Pelatihan melalui Disperindag dan Dinkop UMKM, juga pelatihan Baznas Jateng. Kita juga bantu penduduk miskin mengakses pekerjaan, misal, untuk kerja satpam harus ada 10 syarat, untuk penduduk miskin tidak sampai 10 syarat.

Kepala BPS Jateng menyebut jumlah penduduk miskin Jateng turun 307,99 ribu menjadi 3,4 juta orang, pada September 2024. Angka itu turun menjadi 9,58 persen atau 0,89 persen poin dibanding Maret 2024 yang mencapai 10,47 persen. Penurunan persentase tersebut menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Kinerja Pemprov Jawa Tengah juga turut menyumbang penurunan kemiskinan menjadi satu digit

KESIMPULAN

- Pertumbuhan PDB merupakan masalah utama bangsa, dengan PDB sekitar USD 4.741 perkapita, NKRI berada pada peringkat 194 dari 272 negara-dunia berata-rata PDB perkapita 135.046 USD.
- Bila kegiatan produktif masyarakat meningkat, maka daya beli meningkat, PDB dipengaruhi oleh Etos kerja dan budaya rajin belajar & bekerja meningkatkan output-kinerja masyarakat.
- Reformasi budaya-kerja adalah syarat kenaikan PDB bangsa. Etos-kerja para penganggur, penganggur-tersembunyi dan pencari-kerja harus diubah menjadi budaya-kerja berlamban etos-percaya-diri, etos-bisa, etos tidak terima nasib dan program APBN membangun semangat wira-usaha, melakukan pekerjaan bebas

dalam koridor hukum, akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya-beli nasional.

- Berbagai Kementerian Kesehatan, Kementerian PU , Kementerian Sosial , Kementerian Keamanan , Kementerian Agama , Kementerian Dalam Negeri , Kementerian Keuangan dan BI, kementerian Investasi cq PMA /PMDN dan OJK dll. adalah dasar utama pembentuk dayabeli nasional. Usaha produktif formal dan informal sebuah-bangsa membutuhkan prasarana keamanan-sosial 24 jam , prasarana perekonomian, higiene/kesehatan-sosial cq kebebasan, perlindungan erotif daya-beli berbasis imbalan-kerja dan tabungan terhadap inflasi , pemeliharaan prasarana-fisik / sosial berbagai kementerian.
- Indikator kesehatan dayabeli antara lain adalah stabilitas harga kebutuhan pokok, jumlah angkatan kerja formal, Indeks Penjualan Riil (IPR), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), TPIP/TPID, deflasi karena penurunan dayabeli, jaminan keamanan lapangan-kerja formal, kebijakan makro/mikro ekonomi pro-pertumbuhan ekonomi, perlindungan pasar-domestik , jumlah dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, nisbah konsumsi rumah-tangga terhadap PDB, jumlah kelas-menengah dan pertumbuhan kelas-menengah , jumlah dan pertumbuhan daya-beli kelas menengah , jumlah dan dinamika, pertumbuhan, penurunan *absolut & relatif pengangguran* termasuk pengangguran-tersembunyi terhadap populasi angkatan-kerja, statistik PHK pekerja-formal, statistik pertumbuhan/penyusutan (deindustrialisasi) sektor riil tahunan dan IHSG, statistik surplus/defisit APBN, kenaikan UMP,pajak, tarif Tol, BBM, PPN, pungli dan kesulitan pembuatan/pembaharuan izin-izin usaha, harus diwaspadai berdampak kenaikan populasi PHK tahunan dan berbagai risiko-ekonomi lain, pertumbuhan sektor-usaha kreatif padat-karya dan digitalisasi segala hal yang berpengaruh positif/negatif pada lapangan-kerja formal, nilai-tukar, kemampuan sektor-riil untuk ekspor, perlindungan/pembinaan kabinet terhadap sektor-perekonomian yang menjadi motor-penggerak roda-perekonomian dan berdampak positif bola-salju dan getok-tular, refokus kebijakan populis menjadi kebijakan yang lebih bernilai jangka panjang bagi bangsa, dan berbagai program pembangunan prasarana dan pelaksanaan UU Kesejahteraan Sosial cq perlindungan-sosial yang berdampak positif pada kesempatan kerja , pemerkerjaan , pendapatan & daya beli masyarakat .

Jakarta Medio Juli 2025.

Catatan Redaksi : Serial Program Kabinet di sajikan sebagai edisi tengah bulan KSAP.

1. *Edisi 1 tentang program susu & MSG diunggah Medio Feberuari 2025.*
2. *Edisi 2 tentang UMKM di sajikan Medio Maret 2025.*
3. *Edisi 3 tentang penegakan hukum di sajikan Medio April 2025.*
4. *Edisi 4 tentang pendidikan akan disajikan pada pertengahan Mei 2025.*
5. *Edisi 5 tentang papan bakal-saji medio-Juni 2025.*
6. *Edisi 6 tentang daya-beli di muat pertengahan Juli 2025.*